



# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Disusun oleh:

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Wonogiri

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri. LKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang telah tersusun ini adalah pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Tahun 2021 merupakan perwujudan pelaksanaan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tahun Keenam.

LKIP Dinas PPKB dan P3A Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dinas PPKB dan P3A telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI



Dr. TAGUIGSETIYONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660201 198603 1 009

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Isu Strategis.....	8
E. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	9
F. Landasan Hukum.....	12
G. Sistematika.....	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Rencana Strategis.....	14
B. Visi.....	15
C. Misi.....	16
D. Tujuan dan Sasaran.....	16
E. Indikator Kinerja Utama.....	18
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	20
G. Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	21
H. Rencana Strategis Hasil Reviu.....	21
I. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	23
J. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	27
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	28
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	31
C. Realisasi Anggaran.....	50
D. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja.....	51
 BAB IV PENUTUP.....	52
Penutup.....	52

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu .....	22
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama.....	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	27
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	31
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja .....	33
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	33
Tabel 3.4 Pencapaian target misi.....	34
Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	34
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	36
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	38
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	40
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	43
Tabel 3.10 Skala Penilaian Penyerapan Anggaran.....	50



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

---

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

**B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

VISI :

“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MENUJU KELUARGA KECIL  
BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

MISI :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. Teguh Setiyono, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**a. Sekretariat**

Tugas : menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi : (a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) Pembinaaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas; (c) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas; (d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas; (f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, yaitu :

**a.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.

**a.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan Aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi, penataan organisasi, dan tata



---

laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

**b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi yaitu :

**b.1 Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas** : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan adminitrasi Dinas Bidang Pengendalian Penduduk yang meliputi pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

**b.2 seksi Keluarga Berencana** , melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Keluarga Berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta



organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

### **c. Bidang Keluarga Sejahtera**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaran pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga Sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemeritah bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaa administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang deberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

#### **Bidang Keluarga Sejahtera ,membawahi 2 seksi yaitu :**

**c.1 Seksi Bina Ketahanan Keluarga**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pembangunan keluarga yang meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**c.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas Bidang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.

### **d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi 2 seksi, yaitu :**

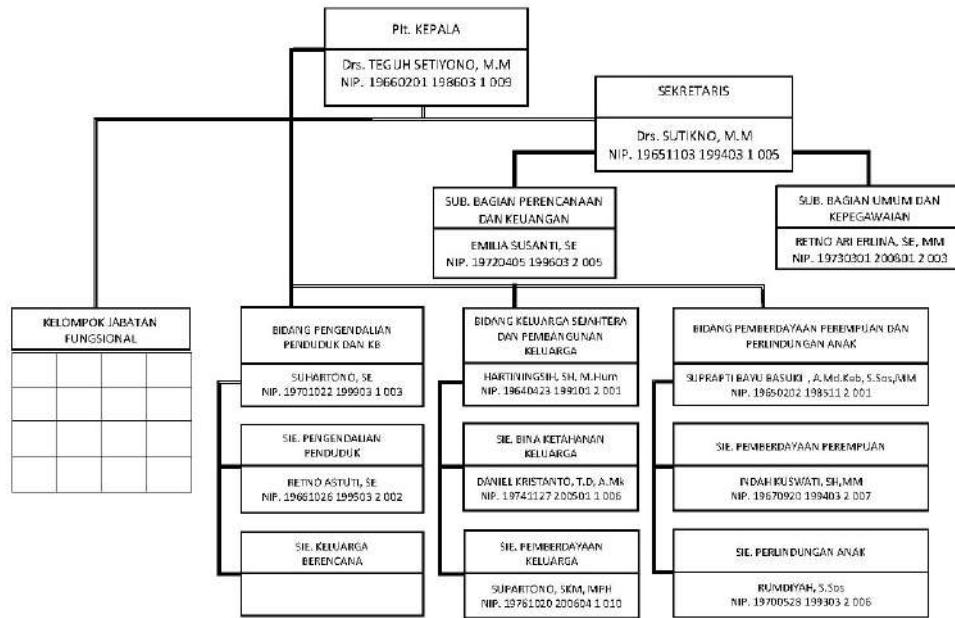
d.1 **Seksi Pemberdayaan Perempuan**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan; kualitas keluarga; dan sistem data gender dan anak.

d.2 **Seksi Perlindungan Anak** , yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan Khusus anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 seksi. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI



#### D. Isu Strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan



yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak.

#### E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan :

- a. Sumber data belum ada saat digunakan untuk pelaporan masih belum tepat waktu pelaporannya.
  - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana lini lapangan Program KKBPK dengan kondisi tenaga penyuluhan lapangan Keluarga Berencana yang tiap tahun terus berkurang, pada tahun 2021 hanya berjumlah 65 orang terdiri dari 30 PLKB dan 35 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4.47.
  - c. Adanya kondisi wabah pandemi Covid 19 yang masih terus melanda sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan pelayanan KB, hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan KB banyak peserta dan petugas medis tidak berani melakukan. Baru pada akhir tahun 2021 pelaksanaan KB mulai berjalan optimal.
  - d. Belum pahamnya tentang regulasi aturan yang baru.
2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
    - a. Sumber data yang lebih cepat.
    - b. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
    - c. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Kampung KB dengan menjalankan protokol kesehatan.
- e. Mongoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan metode pelaksanaan pembagian waktu, jumlah peserta dengan menjalankan protokol kesehatan.
- e. Mengirimkan pendidikan formal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun BKKBN Pusat dengan melalui E-learning.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
- g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara berkala dan berkesinambungan.

**Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :

- a. Masih kurangnya komitmen dari pemegang kebijakan, untuk menyediakan data gender dan anak sebagai data angka untuk melihat isu gender yang ada di kabupaten Wonogiri;
- b. Kurangnya Sinergitas antara Stakeholder/pemegang kebijakan dalam masalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Masih kurangnya komitmen dan peran serta antara stakeholder dalam pemenuhan Hak Anak sehingga capaian Kabupaten Layak anak tidak tercapai;
- d. Kurangnya anggaran yang mendukung program kegiatan di Bidang PP PA

2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

---

- a. Meningkatkan Koordinasi berkala antar pemegang kebijakan dan membuat komitmen untuk membuat data gender dan anak, agar dapat melihat isu gender yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa diatasi dengan cepat dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan koordinasi secara berkala antar stakholder/pemegang kebijakan untuk melakukan penanganan kasus dari proses awal sampai proses pemulihan Psycho sosial sesuai dengan kebutuhan korban.
- c. Meningkatkan koordinasi antar pemegang kebijakan untuk membuat komitmen dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
- d. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Kaukus Perempuan;
- e. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ada 7 (tujuh) Isu Strategik yaitu :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
  - b. Terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan;
  - d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
  - a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
  - b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi;
  - c. Informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.



## F. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021.



## G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Perencanaan Strategis Sebelum Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Dan P3A Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri



tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## B. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi,



harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak”

### C. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi.
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas



Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27
2	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB Aktif	79.50	79.55	79,60	79.60	79.65	79.70
			Unmetneed	9.50	9.50	9	9	8.50	8.50
3	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	-4.89	6.99	12.50	28.57	40	66.67
			Rasio partisipasi perempuan	0.045	0.050	0.055	0.056	0.057	0.060
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	2.70	16.67	26.67	45.45	58.33	60
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya



## E. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Plt. Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### Indikator Kinerja Utama

#### Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Sebagai penentu keberhasilan program KKBPK	Jumlah Penduduk saat ini dikurangi Jumlah Penduduk sebelumnya dibagi Jumlah Penduduk saat ini dikalikan 100%	Data konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB Aktif	%	Sebagai tolok ukur pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100%	Data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

		Unmetneed	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak di Tunda (IAT) ditambah Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%	Data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada perlindungan Perempuan	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap perempuan tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap perempuan Dinas PPKB dan P3A
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada kontribusi Perempuan dalam pembangunan daerah	Jumlah Perempuan yang duduk di Parlemen ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Pemerintahan ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Swasta dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikalikan 100%	BKD Setwan Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Perlindungan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap Anak tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap anak Dinas PPKB dan P3A . .
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Sebagai tolok ukur keberhasilan pemenuhan hak-hak anak	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Dinas PPKB dan P3A



## F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri  
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,27
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	79,70
		Unmetneed	8,50
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	66,67



		Rasio partisipasi perempuan	0,060
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	60
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya

#### G. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021, sebagai berikut :

#### H. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021.



Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan**  
**Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.31	0.30	0.29	0.28	0,28	0.27
2	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	79.50	79.55	79,60	79.60	79,65	79.70
			Unmetneed	%	9.50	9.50	9	9	8,50	8.50
3	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	-4.89	6.99	12.50	28.57	40	66,67
			Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.045	0.050	0.055	0.056	0,057	0.060
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	2.70	16.67	26.67	45.45	58,33	60



			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
--	--	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

### I. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Sebagai penentu keberhasilan program KKBPK	Jumlah Penduduk saat ini dikurangi Jumlah Penduduk sebelumnya dibagi Jumlah Penduduk saat ini dikalikan 100%	Data konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)	..
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	Sebagai tolok ukur pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100%	Data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)	.
		Unmetneed	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak di Tunda (IAT) ditambah Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi	Data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)	.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%		
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada perlindungan Perempuan	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap perempuan tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhaap perempuan Dinas PPKB dan P3A	.
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada kontribusi Perempuan dalam pembangunan daerah	Jumlah Permpuan yang duduk di Parlemen ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Pemerintsh ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Swasta dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikalikan 100%	BKD Setwan Dinas Tenaga Kerja	.
							.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Perlindungan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap Anak tahun lalu dikalikan 100%	Data Korban Kekerasan terhadap Anak Dinas PPKB dan P3A	
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Sebagai tolok ukur keberhasilan pemenuhan hak-hak anak	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Dinas PPKB dan P3A	



### J. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas PPKB dan P3A dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

#### **Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

#### **Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.27
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	79.70
		Unmetneed	%	8.50
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	66.67
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.060
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	60
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Green
2	Baik	75.00 – 89.99	Yellow



3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Plt. Bupati Wonogiri Nomor : 449 tahun 2016, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator



## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 079 tahun 2016 dan melalui Keputusan Plt. Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.27	-2.47	1114
2	Cakupan KB aktif	%	79,70	77,40	97.11



3	Unmetneed	%	8.50	7.89	107.17
4	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	66,67	-59.09	-88.63
5	Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.060	0.036	60
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	60	-155.55	-259.25
7	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya	Pratama	n/a

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Cakupan KB Aktif, dengan capaian kinerja 97,11%, pada indikator Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan, dengan capaian kinerja -88,63%, pada indikator Rasio partisipasi perempuan, dengan capaian kinerja 60%, pada indikator Persentase penurunan kekerasan terhadap anak, dengan capaian kinerja -259,25%, pada indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak belum mencapai Madya dengan realisasi Pratama pada tahun 2021. Sedangkan Capaian kinerja yang melebihi target 100% ditunjukan pada indikator Laju pertumbuhan penduduk, dengan capaian kinerja 1114% dan pada indikator Unmetneed, dengan capaian kinerja 107,17%

### **Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas



Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.27	-2.47	1114
2	Cakupan KB aktif	%	79.70	77.40	97.11
3	Unmetneed	%	8.50	7.89	107.17
4	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	66.67	-59.09	-88.63
5	Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.060	0.036	60
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	60	-155,55	-259.25
7	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya	Pratama	n/a

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	20.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	80.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00
3	Misi 3	4	0	0.00	0	0.00	3	75.00
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>41.67</b>

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	<b>Misi 1</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	<b>Misi 2</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %



2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	50.00 %
C.	<b>Misi 3</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	3	75.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



**Sasaran 1**

Meningkatnya pengendalian laju penduduk

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya pengendalian laju penduduk**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		% Target	Tahun 2019		% Target	Tahun 2020		% Target	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.29	-0.88	503.00	0.28	0.48	28.57	0.28	0.42	50	0.27	-2.47	1114



Sasaran Meningkatnya pengendalian laju penduduk dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Laju pertumbuhan penduduk" adalah sebesar dari target sebesar 0.27 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 1114%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Data ini diambil dari data penduduk konsolidasi bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan rumus menghitung realisasi laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

(Jumlah penduduk saat ini (2021) dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya (2020) dibagi jumlah penduduk saat ini (2021) dikalikan 100%

$$((1.069.659 - 1.096.138) : 1.069.659) \times 100\% = -2,47\%$$

(sumber data : Data Konsolidasi bersih (DKB) Disdukcapil Kab Wonogiri).

Dengan rumus menghitung capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

$2 \times \text{rencana} - \text{realisasi}$  dibagi  $\text{rencana} \times 100\%$  dengan asumsi (semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya )

$$(2 \times 0,27) - (-2,47) : 0,27 \times 100\% = 1114\%$$

Tahun 2021 adalah tahun ke 6 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Laju pertumbuhan penduduk" tahun ini adalah sebesar 1114%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaiannya (50%), pada tahun 2021 capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi, ini karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya kematian penduduk dibandingkan dengan kelahiran penduduk. Dan adanya himbauan untuk menunda kehamilan pada situasi pandemi Covid-19 ini, untuk mengurangi resiko tertularnya Covid-19.



## Sasaran 2

Meningkatnya peserta KB Aktif

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya peserta KB Aktif**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		% Target	Tahun 2019		% Target	Tahun 2020		% Target	Tahun 2021		% Realisasi
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan KB aktif	%	79,60	78,41	98,50	79,60	79,43	99,78	79,65	77,02	96,70	79,70	77,40	97,11
2	Unmetneed	%	9	9,40	95,55	9	9,06	99,33	8,50	9,91	83,41	8,50	7,89	107,17

Sasaran Meningkatnya peserta KB Aktif dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan KB aktif" adalah dari target sebesar 79,70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 77,40 pada Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,11%, capaian ini belum memenuhi target yang diperjanjikan.

(Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur) dikalikan 100%.

$$(122.844 : 158.702) \times 100 \% = 77,40 \%$$

Dengan rumus perhitungan capaian (Realisasi dibagi Rencana dikalikan 100%)

$$77,40 : 79,70 \times 100\% = 97,11\%$$

Tahun 2021 adalah tahun ke-6 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 97,11% yang direncanakan dari target sebesar 79,70%. Capaian cakupan peserta KB Aktif 97,11%, meskipun capaian untuk indikator ini belum 100% tetapi sudah dikatakan baik melihat kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya akseptor KB tidak berani mengikuti prosedur pelaksanaan KB dan pada awal tahun 2021, tenaga medis membatasi pelayanan KB



karena keterbatasan APD. Apabila dibandingkan dengan target provinsi Jawa Tengah sebesar 64,35% realisasi peserta KB Aktif Kabupaten Wonogiri sebesar 77,40% sudah lebih baik atau memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Unmetneed" adalah sebesar dari target sebesar 8,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi sebesar 7,89% pada Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,17%, capaian ini sudah memenuhi target yang diperjanjikan. Pengertian Unmetneed disini adalah kondisi yang mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia. PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), PUS yang Ingin Anak Ditunda (IAT), dengan rumus menghitung realisasi Unmetneed sebagai berikut :

(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Tunda (IAT) ditambah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%

$$((6.128+6.395) : 158.702) \times 100 \% = 7,89\%$$

2 x rencana – realisasi dibagi rencana x 100% dengan asumsi (Semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya).

$$(2 \times 8.50) - 7,89 : 8.50 \times 100 \% = 107,17 \%$$

Tahun 2021 adalah tahun ke-6 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Unmetneed" tahun ini adalah sebesar 107,17%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) dengan target yang sama 8,50 realisasinya sebesar 9,91%, tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020.



### Sasaran 3

Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya kualitas hidup perempuan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		% Target	Tahun 2019		% Target	Tahun 2020		% Target	Tahun 2021		% Target
			Realisasi			Realisasi			Realisasi			Realisasi		
1	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	12.50	65.67	525.00	28.57	17.39	60.86	40	-15,78	-39,45	66,67	-59,09	-88,63
2	Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.055	0.033	60.00	0.056	0.036	64.28	0.057	0,036	63,16	0,060	0,036	60



Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan" adalah sebesar dari target sebesar 66,67 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar -59,09 Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah -88,63 %, capaian ini belum memenuhi target yang diperjanjikan. Dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan triwulan IV tahun 2021 sebanyak 35 kasus sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 sebanyak 22 kasus. Rumus menghitung Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

Jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun (n-1) (2020) dikurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun (n) (2021) dibagi jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) (2020) dikalikan 100 %.

$$((22 - 35) : 22) \times 100 \% = -59,09 \%$$

Dengan asumsi : Semakin turun jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi tingkat capaian kinerjanya.

Tahun 2021 adalah tahun ke-6 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan" tahun ini adalah sebesar -88,63%, situasi pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada kondisi sistem pembelajaran dari rumah, memaksa siswa memegang HP lebih lama, karena pembelajaran bersifat online, dengan kondisi tersebut tidak semua orang tua memantau pemanfaatan HP untuk pembelajaran online dan orang tua juga kurang atau tidak paham tentang teknologi. Disamping itu karena faktor ekonomi orang tua sibuk dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, keluarga sehingga tidak ada pengawasan dalam pemanfaatan teknologi untuk melihat hal-hal negatif. Banyaknya situs-situs online yang mengarah ke pornografi.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio partisipasi perempuan " adalah sebesar dari target sebesar 0.060 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 0,036 pada Tahun 2021 sehingga persentase capaian



kinerjanya adalah 60%, capaian ini belum memenuhi target yang diperjanjikan. Dengan rumus menghitung realisasi rasio partisipasi perempuan sebagai berikut :

(jumlah perempuan di lembaga pemerintah ditambah dilembaga swasta ditambah dilembaga parlemen dibagi jumlah penduduk perempuan )

$$(4.556 + 15.214 + 8) = 19.778 : 535.010 = 0,036 \%$$

(Sumber data : BKD,Setwan,Disnaker dan Disdukcapil)

Tahun 2021 adalah tahun ke-6 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rasio partisipasi perempuan " tahun ini adalah sebesar 60%, bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 0,057% capaian rasio partisipasi perempuan lebih baik tahun 2020 dibandingkan tahun 2021.



**Sasaran 4**

Meningkatnya kualitas hidup anak

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya kualitas hidup anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		% Target	Tahun 2019		% Target	Tahun 2020		% Target	Tahun 2021		%
			Realisasi			Realisasi			Realisasi			Realisasi		
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	26.67	67.74	254.00	45.45	15	33.00	58.33	- 5,88	-10,08	60	-155,55	-259,25
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama	-	-	Pratama	-	-	Madya	-	-	Madya	Pratama	



Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap anak " adalah sebesar dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi -155,55 pada Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah -259,25 %, capaian ini belum memenuhi target yang diperjanjikan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 46 kasus dan kasus pada tahun 2020 sebanyak 18 kasus. Dengan rumus menghitung realisasi Persentase penurunan kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

Jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) 2020 dikurangi tahun (n) 2021 dibagi jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) 2020 dikalikan 100%

$$((18-46 : 18 ) \times 100 \% = -155,55 \%$$

Dengan asumsi : semakin turun jumlah kekerasan terhadap anak semakin tinggi tingkat capaiannya

Tahun 2021 adalah tahun ke 6 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap anak " tahun ini adalah sebesar -259,25%. Hal ini dikarenakan jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Situasi pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena korban kasus kekerasan pada anak lebih banyak korban terjadi pada anak perempuan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak" adalah Pratama dari target Madya yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2021. Dan beberapa kegiatan yang mendukung Capaian Kabupaten Layak Anak tetap dilakukan di Tahun 2021 antara lain :

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA
2. Koordinasi dan Advokasi kepada Pendamping Desa untuk mewujudkan Desa Layak Anak



3. Menyusun Raperda Penyelenggaraan KLA inisiasi DPRD Kabupaten Wonogiri.

#### **Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi yang dilakukan**

##### **a. Laju Pertumbuhan Penduduk**

###### **Faktor Keberhasilan :**

1. Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Penduduk
2. Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan
3. Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

###### **Faktor Kegagalan :**

1. Masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki
2. Keinginan seseorang untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu
3. Masih adanya sebagian yang mempunyai tingkat pendidikan rendah
4. Adanya larangan dari suami untuk mengikuti KB
5. Adanya wabah pandemi Covid-19

###### **Solusi :**

- Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
- Melakukan pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.

##### **b. Cakupan KB Aktif dan Unmetneed**

###### **Faktor Keberhasilan :**

1. Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan.
2. Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah.
3. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja.
4. Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19.



**Faktor Kegagalan :**

1. Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki
2. Masih kurangnya kesadaran dalam pemakaian kontrasepsi
3. Takut efek samping dalam penggunaan alat kontrasepsi
4. Takut melaksanakan KB di fasilitas kesehatan karena pandemi covid 19

**Solusi**

- Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP dan tetap menjalankan protokol kesehatan, Sehingga dapat meningkatkan pencapaian peserta KB Baru, khususnya MKJP / NON MKJP menjadi MKJP di masing-masing wilayah terutama daerah terpencil.

**c. Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Rasio Partisipasi Perempuan**

**Faktor Keberhasilan :**

1. Adanya keterwakilan perempuan di legislatif.
2. Sudah adanya SATGAS PPA
3. Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Sudah tersedianya Nomor layanan pengadaan P2TP2A
5. Adanya koordinasi antar lembaga layanan

**Faktor Kegagalan :**

- Kondisi sosial budaya / budaya patrialis menjadi salah satu faktor penghalang aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan.
- Masih adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah inter keluarga, sehingga beranggapan pihak luar tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain.
- Lemahnya ekonomi perempuan / tidak memiliki kemandirian secara ekonomi. Hal ini didukung oleh kondisi adanya wabah Covid 19.
- Faktor pendidikan perempuan yang masih rendah.



**Solusi :**

- Kebijakan Afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik.
- Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera.
- Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan di 25 Kecamatan.
- Memberikan afirmasi terhadap perempuan untuk wajib belajar, antara lain mengikuti kejar paket.

**d. Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak**

**Faktor Keberhasilan :**

1. Adanya lembaga forum anak
2. Pengembangan sekolah ramah anak
3. Pengembangan puskesmas ramah anak
4. Pengembangan desa/kelurahan layak anak
5. Pengembangan kesehatan ramah anak
6. Peningkatan pemenuhan hak anak khususnya di perlindungan anak

**Faktor Kegagalan :**

1. Belum adanya kesadaran tentang hak anak
2. Belum adanya kesadaran tentang perlindungan anak sesuai dengan konfensi hak anak (KHA)
3. Kurangnya pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak
4. Kurangnya pemahaman tentang Perlindungan Anak



**Solusi :**

1. Sosialisasi tentang pengembangan Kabupaten Layak anak
2. Pembentukan kelembagaan Forum Anak sampai ditingkat terbawah
3. Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak
4. Memberikan inisiasi terkait pencagahan kekerasan terhadap anak di 25 Kecamatan.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Sasaran Meningkatnya Laju Pengendalian Penduduk dengan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. Program yang menunjang adalah Program Pengendalian Penduduk dengan sub kegiatan yang menunjang Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
2. Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif dan Indikator Cakupan KB Aktif dan Unmetneed. Program dan sub kegiatan yang menunjang Cakupan KB Aktif dan Unmetneed sebagai berikut :
  1. Program Pembinaan Keluarga Berencana :
    - a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
    - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
    - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
    - d. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
    - e. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
    - f. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Tersusuk Jaringan dan Jejaringnya
    - g. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
    - h. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB



- i. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - j. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - k. Peningkatan Kesertaan KB Pria
  - l. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) :
- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - b. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dengan Indikator Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Rasio partisipasi perempuan. Program dan sub kegiatan yang menunjang adalah sebagai berikut :  
Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sub kegiatannya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak dengan Indikator Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak. Program dan sub kegiatan yang menunjang adalah sebagai berikut :  
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sub kegiatannya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.



### C. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri. Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran per Program/ Kegiatan Kabupaten Wonogiri menggunakan skala sebagai berikut.

**Tabel 3.10**  
**Skala Penilaian Penyerapan Anggaran**

No.	Interval Nilai Persentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penilaian Penyerapan Anggaran	Kode
1	91 >	Sangat Baik	
2	76 < 90	Tinggi	
3	66 < 75	Sedang	
4	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Maka penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 berdasar Program dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



#### **D. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD**

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan 100 (seratus). Secara lengkap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini.



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.



---

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hanya 1 indikator saja yang tercapai yaitu Unmeeted pada sasaran kedua.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.231.150.156 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.784.822.152 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah), pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 0

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 6 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.784.822.152 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah 82,81% dari anggaran yang direncanakan, tetapi apabila dilihat dari anggaran non gaji capaiannya sebesar 87,36% hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Drs. TEGUH SETIYONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660201 198603 1 009

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
- 3) Lain-lain yang di anggap perlu

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Periode 2016 - 2021

Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	1,1 Laju pertumbuhan penduduk	%	0,27	-2,47	1114	1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	41.619.398	33.495.284	80	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				1114	TOTAL PER SASARAN	41.619.398	33.495.284	80	
<hr/>											
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	2,1 Cakupan KB aktif	%	79,7	77,40	97,11	2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	8.427.886.743	7.200.188.447	85	
		2,2 Unmetneed	%	8,50	7,89	107,17	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	916.829.869	880.496.174	95	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					TOTAL PER SASARAN	9.344.716.612	8.080.684.621	86	
<hr/>											
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3,1 Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	66,67	-59,09	88,63	4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	95.274.714	91.520.508	96	
		3,2 Rasio partisipasi perempuan	Angka	0,06	0,036	60,00					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					TOTAL PER SASARAN	95.274.714	91.520.508	96	
<hr/>											
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	4,1 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	60	-155,65	-259,25	5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	67.245.255	65.773.400	95	
		4,2 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya	Pratama	n/a	6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.682.294.177	3.513.348.339	75	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					TOTAL PER SASARAN	4.749.539.432	3.579.121.739	75	
<hr/>											
TOTAL KESELURUHAN								14.231.150.166	11.784.822.152	83	

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Total ( Tw 1 + 2 + 3 + 4 )	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Sasaran 1 Meningkatnya pengendalian laju penduduk</b>												
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
1.1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	41.619.398	6.820.000	16,39	1.781.700	4	-	0	24.893.584	60	33.495.284	80
	Total Per Sasaran	41.619.398	6.820.000	18	1.781.700	4	-	0	24.893.584	60	33.495.284	80
<b>Sasaran 2 Meningkatnya peserta KB Aktif</b>												
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
2.1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	251.660.000	37.431.818	15	22.440.200	9	27.854.378	11	147.568.243	59	235.295.639	93
2.2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	15.229.124	1.880.000	12	2.800.860	18	-	-	8.927.587	59	13.608.447	89
2.3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.801.200.000	223.982.155	12	344.053.858	19	278.329.658	15	889.289.452	49	1.733.655.121	98
2.4	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.411.200.000	-	-	588.000.000	42	352.800.000	25	470.400.000	33	1.411.200.000	100
2.6	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	97.314.000	20.600.000	21	26.750.000	27	22.500.000	23	26.150.000	26	95.000.000	88
2.7	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.997.875.000	3.489.000	0	122.722.200	6	249.323.975	12	629.788.000	32	1.005.323.175	50
2.8	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.633.660.350	-	-	-	-	824.687.096	54	633.769.830	41	1.458.456.926	95
2.9	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	10.999.716	79.500	1	-	-	-	-	7.363.700	67	7.443.200	68
2.10	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	16.398.667	-	-	2.820.000	17	-	-	9.487.339	58	12.307.339	75
2.11	Peningkatan Kesertaan KB Pria	57.149.886	-	-	11.480.000	20	-	-	22.355.600	39	33.835.600	59
2.12	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.235.200.000	88.092.000	7	353.912.000	29	268.800.000	22	463.259.000	39	1.194.083.000	87
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
3.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPPKS)	288.415.350	-	0	3.484.174	1	259.445.000	90	-	-	262.929.174	91

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Total ( Tw 1 + 2 + 3 + 4 )		
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3.2 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.389.532	-	0	3.190.000	18	-	-	14.160.200	81	17.350.200	100	
	3.3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	594.800.000	35.680.000	6	80.656.000	10	145.120.000	24	342.560.000	58	584.016.000	98	
	3.4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16.224.987	-	0	3.020.000	19	-	-	13.180.800	81	16.200.800	100	
Total Per Sasaran			9.344.716.612	411.234.473	4	1.546.329.290	17	2.426.860.107	26	3.687.260.751	40	8.080.684.621	66
<b>Sasaran 3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan</b>													
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												
	4.1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95.274.714	5.770.878	6	26.409.000	28	36.017.037	38	23.323.593	24	91.520.508	98	
Total Per Sasaran			95.274.714	5.770.878	6	26.409.000	28	36.017.037	38	23.323.593	24	91.520.508	98
<b>Sasaran 4 Meningkatnya kualitas hidup anak</b>													
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
	5.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	67.245.255	23.343.000	35	2.560.000	4	8.320.000	12	31.550.400	47	65.773.400	98	
<b>6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.908	1.450.000	21	-	-	759.600	11	4.784.200	68	6.993.800	100	
6.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.722	-	-	-	-	1.176.000	59	663.900	33	1.839.900	92	
6.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.290.249.028	557.830.364	17	683.606.485	20	496.792.689	15	508.941.221	15	2.227.170.759	68	
6.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.999.708	1.270.000	64	-	-	-	-	729.500	36	1.999.500	100	
6.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.972.410	-	-	28.040.071	70	11.932.339	30	-	-	39.972.410	100	
6.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.490.000	1.800.000	21	2.460.000	29	1.315.000	15	2.915.000	34	8.490.000	100	
6.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.945.400	-	-	8.499.140	66	2.224.040	17	2.222.220	17	12.945.400	100	

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Total ( Tw 1 + 2 + 3 + 4 )	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.999.913	1.140.000	3	8.880.000	23	5.270.000	14	23.709.000	61	38.999.000	100
	6.9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	900.000	45	660.000	33	220.000	11	220.000	11	2.000.000	100
	6.10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.850.400	13.171.980	15	15.540.626	18	16.065.479	18	18.387.411	21	63.145.498	73
	6.11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.115.771.567	176.298.090	16	344.646.000	31	174.664.517	16	341.844.000	31	1.037.452.607	93
	6.12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.034.121	4.203.500	8	12.731.650	23	12.954.100	24	21.566.675	39	51.455.925	93
	6.13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.992.000		-	3.677.500	46	1.051.000	13	3.231.200	40	7.959.700	100
	6.14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.990.000	1.710.000	13	3.400.000	26	1.425.790	11	6.388.050	49	12.923.840	99
	Total Per Sasaran	4.749.539.432	783.116.934	16	1.094.701.474	23	734.170.554	15	967.132.777	20	3.679.121.738	75
	Grand Total	14.231.150.156	1.206.942.285	8	2.868.221.484,00	19	3.197.047.698	22	4.712.610.705	33	11.784.822.152	83



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TEGUH SETIYONO, M.M

Jabatan : Plt. Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JOKO SUTOPO

Wonogiri, November 2021

Pihak Pertama,

Drs. TEGUH SETIYONO, M.M

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis dan Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,27 %
2.	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	79,70 %
		Unmetneed	8,50 %
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	66,67 %
		Rasio partisipasi perempuan	0,060 Angka
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	60,00 %
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama Tingkat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 95.274.714	APBD
2.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 67.245.255	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.682.294.177	APBD
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 41.619.398	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 8.427.886.743	APBD, APBN
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 916.829.869	APBD, APBN



Bupati Wonogiri,



Wonogiri, November 2021  
pt. Kepala Dinas PPKB dan P3A

Drs. TEGUH SETIYONO, M.M

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2021**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN WONOGIRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,27 %
2.	Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	Cakupan KB aktif  Unmetneed	79,70 %  8,50 %
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan  Rasio partisipasi perempuan	66,67 %  0,060
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak  Tingkat capaian kabupaten layak anak	60 %  Madya

Wonogiri, Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN WONOGIRI**



dr. SETYARINI, M.Kes  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650601 199003 2 005